

Kajian Limbah

Ringkasan inti:

- **Kajian limbah** membantu perusahaan memahami sumber timbulan, jalur pengelolaan, dan titik kendali kepatuhan untuk mencegah pencemaran dan risiko sanksi.
- **Output kajian** umumnya mencakup baseline data, evaluasi sistem pengelolaan, kebutuhan dokumen/izin teknis, dan rekomendasi perbaikan yang realistis untuk operasional.
- **Regulasi kunci** berada pada kerangka PPLH, turunan Cipta Kerja, serta aturan teknis baku mutu dan tata cara persetujuan/surat operasional.



A) Air Permukaan

1. UU No. 32 Tahun 2009

Regulation/Standard: UU No. 32 Tahun 2009

Title (EN): *Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management*

Judul (ID): Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Date (year): 2009

Summary:

UU ini menjadi payung hukum utama pengelolaan lingkungan hidup, mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan.

[LINK REGULASI](#)

2. Perpu No. 2 Tahun 2022

Regulation/Standard: Perpu No. 2 Tahun 2022

Title (EN): *Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation*

Judul (ID): Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Date (year): 2022

Summary:

Perpu ini mengatur kerangka reformasi kebijakan untuk mendukung ekosistem investasi dan perizinan, termasuk penataan ketentuan yang berdampak pada tata kelola perizinan dan pemenuhan kewajiban lingkungan dalam kegiatan usaha.

[LINK REGULASI](#)

3. UU No. 6 Tahun 2023

Regulation/Standard: UU No. 6 Tahun 2023

Title (EN): *Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Perpu No. 2 of 2022 on Job Creation into Law*

Judul (ID): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Date (year): 2023

Summary:

UU ini menetapkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi dasar hukum utama reformasi perizinan, lingkungan, dan investasi berbasis risiko.

[LINK REGULASI](#)

4. PP No. 22 Tahun 2021

Regulation/Standard: PP No. 22 Tahun 2021

Title (EN): *Government Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management*

Judul (ID): Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Date (year): 2021

Summary:

PP ini mengatur pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk persetujuan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengelolaan limbah, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif.

[LINK REGULASI](#)

B) Air Bersih

1. UU No. 32 Tahun 2009

Regulation/Standard: UU No. 32 Tahun 2009

Title (EN): *Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management*

Judul (ID): Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Date (year): 2009

Summary:

UU ini menjadi dasar umum pengelolaan aspek lingkungan, termasuk pencegahan dan pengendalian pencemaran yang dapat mempengaruhi kualitas media lingkungan.

[LINK REGULASI](#)

2. Permenkes No. 2 Tahun 2023

Regulation/Standard: Permenkes No. 2 Tahun 2023

Title (EN): *Minister of Health Regulation No. 2 of 2023 on Implementing Provisions for Government Regulation No. 66 of 2014 on Environmental Health*

Judul (ID): Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Date (year): 2023

Summary:

Peraturan ini mengatur pelaksanaan kesehatan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko lingkungan, termasuk pengendalian faktor lingkungan yang berkaitan dengan air untuk kebutuhan higiene dan sanitasi.

[LINK REGULASI](#)

C) Air Limbah Domestik

1. UU No. 32 Tahun 2009

Regulation/Standard: UU No. 32 Tahun 2009

Title (EN): *Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management*

Judul (ID): Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Date (year): 2009

Summary:

UU ini menjadi dasar kewajiban pencegahan dan pengendalian pencemaran, termasuk pengelolaan air limbah dari kegiatan operasional.

[LINK REGULASI](#)

2. Perpu No. 2 Tahun 2022

Regulation/Standard: Perpu No. 2 Tahun 2022

Title (EN): *Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation*

Judul (ID): Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Date (year): 2022

Summary:

Perpu ini menata kerangka perizinan dan kewajiban berbasis risiko yang berdampak pada pemenuhan persyaratan lingkungan, termasuk ketentuan teknis pengendalian pencemaran.

[LINK REGULASI](#)

3. UU No. 6 Tahun 2023

Regulation/Standard: UU No. 6 Tahun 2023

Title (EN): *Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Perpu No. 2 of 2022 on Job Creation into Law*

Judul (ID): UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Date (year): 2023

Summary:

UU ini mengukuhkan reformasi perizinan dan ketentuan turunannya sebagai rujukan utama bagi pemenuhan kewajiban lingkungan.

[LINK REGULASI](#)

4. PP No. 22 Tahun 2021

Regulation/Standard: PP No. 22 Tahun 2021

Title (EN): *Government Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management*

Judul (ID): PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH

Date (year): 2021

Summary:

PP ini menjadi rujukan pelaksanaan PPLH, termasuk ketentuan pengendalian pencemaran air, perangkat persetujuan, pengawasan, dan sanksi administratif.

[LINK REGULASI](#)

5. PermenLHK No. 5 Tahun 2021

Regulation/Standard: PermenLHK No. 5 Tahun 2021

Title (EN): *MoEF Regulation No. 5 of 2021 on Procedures for Issuing Technical Approval and Operational Feasibility Letter in Environmental Pollution Control*

Judul (ID): Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Date (year): 2021

Summary:

Peraturan ini mengatur tata cara penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan pengendalian pencemaran, termasuk untuk pengelolaan dan pembuangan air limbah.

[LINK REGULASI](#)

6. Permen LH/BPLH No. 11 Tahun 2025

Regulation/Standard: Permen LH/BPLH No. 11 Tahun 2025

Title (EN): *Minister/Environmental Control Agency Regulation No. 11 of 2025 on Domestic Wastewater Effluent Standards and Treatment Technology Standards*

Judul (ID): Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik

Date (year): 2025

Summary:

Peraturan ini menetapkan baku mutu dan standar teknologi pengolahan air limbah domestik sebagai acuan pengendalian pencemaran air, termasuk target kualitas keluaran dan pendekatan teknologi yang dapat digunakan.

[LINK REGULASI](#)

D) Limbah B3 dan Non-B3

1. UU No. 32 Tahun 2009

Regulation/Standard: UU No. 32 Tahun 2009

Title (EN): *Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management*

Judul (ID): Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Date (year): 2009

Summary:

UU ini menjadi dasar kewajiban pengelolaan dampak lingkungan, termasuk kewajiban pengendalian dan kepatuhan terkait pengelolaan limbah.

[LINK REGULASI](#)

2. Perpu No. 2 Tahun 2022

Regulation/Standard: Perpu No. 2 Tahun 2022

Title (EN): *Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation*

Judul (ID): Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Date (year): 2022

Summary:

Perpu ini mendorong penataan perizinan berbasis risiko yang berdampak pada pemenuhan persyaratan dasar dan kewajiban pengelolaan lingkungan dalam aktivitas usaha.

[LINK REGULASI](#)

3. UU No. 6 Tahun 2023

Regulation/Standard: UU No. 6 Tahun 2023

Title (EN): *Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Perpu No. 2 of 2022 on Job Creation into Law*

Judul (ID): UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Date (year): 2023

Summary:

UU ini mengukuhkan kerangka Cipta Kerja sebagai landasan hukum, termasuk penataan ketentuan yang berkaitan dengan kepatuhan lingkungan.

[LINK REGULASI](#)

4. PP No. 22 Tahun 2021

Regulation/Standard: PP No. 22 Tahun 2021

Title (EN): *Government Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management*

Judul (ID): PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH

Date (year): 2021

Summary:

PP ini mengatur pelaksanaan PPLH, termasuk ketentuan pengelolaan limbah dalam kerangka persetujuan, pengawasan, dan penegakan sanksi administratif.

[LINK REGULASI](#)

3. PermenLHK No. 6 Tahun 2021

Regulation/Standard: PermenLHK No. 6 Tahun 2021

Title (EN): *MoEF Regulation No. 6 of 2021 on Procedures and Requirements for Hazardous and Toxic Waste (B3) Management*

Judul (ID): Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Date (year): 2021

Summary:

Peraturan ini mengatur tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3 secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk persyaratan teknis, administrasi, dan ketertelusuran pengelolaan.

[LINK REGULASI](#)

E) Sampah Domestik beserta Tempat Penampungan Sementara (TPS)

1. UU No. 18 Tahun 2008

Regulation/Standard: UU No. 18 Tahun 2008

Title (EN): *Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2008 on Waste Management*

Judul (ID): Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Date (year): 2008

Summary:

UU ini mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta ketentuan pengawasan dan sanksi.

[LINK REGULASI](#)

2. PP No. 27 Tahun 2020

Regulation/Standard: PP No. 27 Tahun 2020

Title (EN): *Government Regulation No. 27 of 2020 on Specific Waste Management*

Judul (ID): Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Date (year): 2020

Summary:

PP ini mengatur penanganan sampah spesifik yang memerlukan metode khusus karena karakteristik, volume, frekuensi timbulan, atau kondisi tertentu, termasuk kategori seperti sampah yang mengandung B3, sampah akibat bencana, puing bongkaran, dan sampah yang belum dapat diolah dengan teknologi yang tersedia.

[LINK REGULASI](#)

Ingin tahu seputar Enthalphy?



Akses Company Profile kami untuk informasi lebih lanjut seputar layanan kami dan apa yang bisa kami bantu untuk perusahaan anda.

[Download di sini!](#)



PT Enthalphy Environergy Consulting

www.enthalphy.com
Jl. Tegal Melati, Jongkang, Sariharjo, Kec. Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
+62 821 6174 1128
contact@enthalphy.com